

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil kemudian diawali kata *per* dan diakhiri kata *an*, artinya adalah sesuatu yang berhubungan tentang permasalahan urusan tentang adil.²¹

Di dalam bahasa belanda terkenal dengan istilah *rechtpraak* , kemudian di dalam bahasa arab terkenal dengan istilah *al-qadha*. Istilah ini sebenarnya secara etimologis di dalam al-Qur'an memiliki bermacam arti bisa memiliki arti mengakhiri, menyelesaikan, menunaikan dan bisa juga berarti memerintahkan.

Secara terminologis istilah peradilan ini oleh seorang ahli hukum islam dimaksudkannya sebagai suatu urusan atau tugas untuk menyelesaikan persengketaan guna menghentikan gugat menggugat dan guna memotong pertengkaran dengan hukum-hukum syara' yang diambil dari al-Qur'an dan hadis.

Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu tata kehidupan dalam masyarakat dan negara yang tertib dan teratur, setiap orang dapat dilindungi dari setiap gangguan. Sebaliknya, setiap orang melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, dengan tercipta suatu masyarakat

²¹ Poerwadarmita. 1980. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka. Hal. 15.

yang tertib dan teratur, sudah barang tentu akan dapat terwujudnya suasana prikehidupan yang aman dan tenteram.²²

Peradilan agama merupakan sebutan yang resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah yang ada di Indonesia, tiga lingkungan Peradilan lainnya diantaranya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama ini hanya memiliki wewenang di bidang perdata tertentu saja, pidana tidak termasuk dan juga hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, akan tetapi dalam perkara-perkara perdata tertentu saja, tidak mencakup seluruh perdata Islam.²³

Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam yang ada di Indonesia, hal itu dikarenakan dari jenis-jenis perkara yang diperbolehkan mengadilinya, seluruhnya merupakan jenis perkara menurut ketentuan agama Islam, dirangkaikannya kata Peradilan Islam dengan kata-kata Indonesia adalah disebabkan jenis perkara yang diperbolehkan mengadilinya tersebut tidaklah menjangkau segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara umum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Pengadilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat

²² Taufiq Hamami. 2003. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung. Penerbit PT Alumni. Hal. 35.

²³ Roihan A. Rasyid. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Penerbit PT Rajagrafindo Persada. Hal. 5.

Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara persdata islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.²⁴

2. Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah, kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau Kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Kompetensi (wewenang) peradilan agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan agama untuk mengadili berdasarkan materi hukum.²⁵

Kompetensi relatif peradilan agama merujuk pada 118 HIR atau pasal 142 RBg jo. 66 dan pasal 54 uu no. 7 tahun 1989, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acar perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.²⁶

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

a. Perkawinan,

²⁴ *Ibid.* Hal. 6.

²⁵ Musthofa. 2005. *Kepaniteraan Pengadilan Agama*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 9.

²⁶ Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 53.

- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat
- g. Infak,
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syariah

Dalam pasal 50 uu no.3 tahun 2006 ditentukan, bahwa pengadilan agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama islam.

Ini dilakukan untuk menghindari upaya memperlama ataupun mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa disebabkan alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. Berbanding terbalik ketika subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek yang bersengketa di pengadilan ditunda untuk menunggu ke pengadilan di lingkungan peradilan umum.²⁷

Penangguhan disini yaitu penangguhan yang dilaksanakan hanya jika pihak yang berkeberatan tersebut telah mengajukan bukti-bukti ke

²⁷ *Ibid.* Hal. 54.

Pengadilan Agama yang mana telah didaftarkan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama di Pengadilan Agama. Kemudian jika objek sengketa tersebut lebih dari satu objek yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, yang dimaksud disini peradilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud tersebut.

Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat serta memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan ada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara rasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.²⁸

3. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat untuk mencari suatu keadilan yang dalam hal ini beragama Islam dalam perkara tertentu sebagaimana termaktub dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi ada pengkhususan pengadilan yaitu peradilan Syariah Islam yang ada di Provinsi Aceh.

Peradilan Agama terdiri atas:

²⁸ *Ibid.* Hal. 55.

- a. Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota madya/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.
- b. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, yaitu badan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. MA merupakan peradilan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota Negeri RI, yaitu di Jakarta. Mahkamah Agung dalam hal pelaksanaannya merupakan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung tersebut.²⁹

4. Kedudukan Peradilan Agama dalam Negara Hukum Republik Indonesia

Menurut Marulak pardede seperti dikutip Taufiq Hamami Kedudukan Badan Peradilan Agama dalam Negara Hukum Republik Indonesia adala sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, dan sebagai Badan Peradilan Khusus sebagaimana halnya Peradilan Militer

²⁹ *Ibid.* Hal. 65.

dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kekuasaan Hakim yang dilaksanakannya adalah dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan sama sekali daripada hukum agamanya (Islam).

Diperlukannya badan peradilan agama sebagai salah satu pelaksana daripada kekuasaan kehakiman dalam negara Hukum Republik Indonesia, karena memang merupakan bagian bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketentraman bagian terbesar dari bangsa Indonesia (umat Islam), akibat daripada islam sebagai agama hukum, ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan umat islam khususnya di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan sama sekali daripada aturan hukum agamanya.³⁰

5. Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Badan Peradilan Agama

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama, dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kedua jenis pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 3.

Sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima mengadili serta

³⁰ Taufiq Hamami, *Op.cit.* Hal. 47.

menyelesaikan perkara yang ditanganinya bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, paksaan dan rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudisial* , kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Undang-undang.

Menurut K.wancik Saleh seperti dikutip Taufiq Hamami Pemberian kebebasan ini memang sudah sepatutnya, karena perbuatan mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan, sehingga perbuatan ini (mengadili) harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum maupun golongan dalam masyarakat, apalagi dalam suatu kekuasaan pemerintah yang biasa mempunyai jaringan yang kuat dan luas, sehingga dikhawatirkan pihak lainnya yang lemah akan akan dirugikan.³¹

6. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

- a. *Het Herziene Indonesiech Reglement* (HIR atau Reglement Indonesia yang diperbarui: St 1848 No. 16, Stbl. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa Madura.
- b. *Recht Reglemnt Buitengewesten* (RBg. Atau *Reglement* daerah seberang: Stbl. 1927 No. 227) untuk luar Jawa Madura.
- c. *Reglement op de Burgelijk Rechtvordering* (RV atau *Reglement* Hukum Acara Perdata untuk golongan eropa: Stbl 1847 No. 52, 1849 No. 63)

³¹ *Ibid.* Hal. 49.

- d. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat juga beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata.
- e. Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Bab IV pasal 54 s/d 91) merupakan perbaikan dan pembaharuan terhadap Hukum Acara yang mengatur proses perceraian yang diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
- f. Yurisprudensi.³²

B. Tinjauan Mengenai Asas-Asas Umum Peradilan Agama

Di dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur beberapa asas umum Peradilan Agama, yang dimaksud asas umum Peradilan Agama adalah asas hukum tertentu dalam bidang hukum acara yang secara khusus dimiliki oleh Peradilan Agama. Asas-asas umum yang dimaksud yaitu:

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini diatur di dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi Peradilan Agama merupakan salah satu Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu, di dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga UU No. 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan

³² Wildan Suyuthi Mustofa. 2002. *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta. Penerbit PT Tatanusa. Hal. 14-15.

tingkat pertama dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.³³

Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara dibidang tertentu yakni perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, serta wakaf dan sedekah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam selainnya , baik itu kristen protestan, Hindu, Budha dan lain-lain, penyelesaian perselisihan tentang hal tersebut tidak dapat dilayani oleh pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, karena tempat penyelesaian perselisihannya adalah merupakan wewenang Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.³⁴

Asas-asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama, yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam
- b. Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah
- c. Hubungan hukum yang mendasari keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum islam.

Patokan asas personalitas keislaman penerapannya didasarkan kepada patokan umum dan patokan pada saat terjadi hubungan hukum, patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama islam

³³ Mardani, *Op.cit.* Hal. 37.

³⁴ Taufiq Hamami, *Op.cit.* Hal. 97.

maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman. Adapun asas personalitas keislaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum ditentukan oleh 2 (dua) syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara sama-sama beragama islam.
- b. Hubungan ikatan hukum yang merekan laksanakan adalah berdasarkan hukum islam.³⁵

2. Asas Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip yang tak kalah penting di suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁶

Menurut Yahya Harahap seperti dikutip Taufik Hamami kebebasan disini maksudnya tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur dalam penanganan suatu perkara oleh Pengadilan/Majelis hakim , ikut campur, dapat berubah pemaksaan, directive atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudisial*, ancaman dan lain sebagainya.

Namun kebebasannya pun bukan kebebasan tanpa batas membabi buta , tetapi kebebasan dalam hal menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menangani suatu kasus yang diperiksanya, menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan dan kebebasan mencari

³⁵ Mardani, *Op.cit.* Hal. 38.

³⁶ *Ibid.* Hal. 39.

dan menemukan hukum, kebebasan untuk memakai/tidak memakai yurisprudensi dan lain-lain.³⁷

Untuk memperkuat prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, yang mana sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilaksanakan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970.

Melalui perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut diadakannya sebuah kebijakan bahwa segala macam urusan mengenai peradilan baik itu mengenai teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah satu atap, maksudnya yaitu berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Maksud adanya perubahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Agar hakim peradilan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas disini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif atau lainnya.
- b. Agar hakim peradilan bebas dari paksaan, arahan , rekomendasi yang datang dari ekstra yudisial.
- c. Agar hakim peradilan mempunyai kebebasan wewenang yudisial.

Dalam hal ini kebebasan hakim tidak bersifat absolut, tetapi terbatas pada:

- 1) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undang secara benardalam menyelesaikan perkara.

³⁷ Taufiq Hamami, *Op.cit.* Hal. 101.

- 2) Menginterpretasikan hukum (undang-undang) secara tepat melalui metode interpretasi yang di benrkan.
- 3) Kebebasan mencari suatu hukum dan menemukan suatu hukum, baik melalui yurisprudensi, doktrin hukum, hukum tidak tertulis (adat), dan pendekatan realisme, yaitu mencari dan menemukan suatu hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, dan kepatutan (kelaziman).³⁸

3. Asas Upaya Mendamaikan

Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan, kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dan suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam kesumat yang berkepanjangan. Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini maksud suatu perdamaian di dalam perkara perceraian memiliki nilai keluhuran, maksudnya yaitu keutuhan ikatan perkawinan akan dapat diselamatkan, pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal dapat diselamatkan, kerukunan antar kedua belah pihak dapat berlanjut, harta gono gini dapat lestari dalam menopang kehidupan rumah tangga, dan suami istri dapat terhindar dari gangguan pergaulan hidup sehari-hari.

³⁸ Mardani, *Op.cit.* Hal. 40.

Memperhatikan itu semua, upaya mendamaikan perkara sengketa perceraian bersifat imperatif. Usaha mendamaikan merupakan sesuatu yang diharuskan atau dwajibkan hukum kepada hakim. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus secara optimal.³⁹

Dalam hal usaha perdamaian berhasil, dibuatlah akta perdamaian, dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perdamaian tersebut, kekuatannya sama dengan putusan, mengikat dan dapat di eksekusi, akan tetapi, dalam hal perkara perceraian, apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, tidak dibuat akta perdamaian, melainkan perkara dicabut oleh pihak penggugat/pemohon, atas pencabutan tersebut hakim mengeluarkan penetapan yang isinya tentang pernyataan pencabutan dan penggugat atau pemohon di hukum untuk membayar biaya perkara.⁴⁰

4. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Pada prinsipnya semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang mengatakan lain atau juga jika hakim dengan beberapa alasan penting yang dicatat di berita acara sidang memerintahkan bahwasanya pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilaksanakan dengan sidang tertutup. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang mengajarkan *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum.⁴¹

³⁹ *Ibid.* Hal. 41.

⁴⁰ Taufiq Hamami, *Op.cit.* Hal. 101.

⁴¹ Mardani, *Op.cit.* Hal. 42.

Menurut Yahya Harahap seperti dikutip Taufiq Hamami tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti bersikap berat sebelah hakim bertindak sewenang-wenang. Untuk itulah masyarakat oleh UU diperkenankan untuk menghadiri jalannya persidangan diperbolehkannya masyarakat hadir untuk mendengarkan pemeriksaan di persidangan untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan peradilan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.⁴²

5. Asas Legalitas

Asas legalitas di dalam pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang. Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan pasal di atas mengandung pengertian *rule of the law*, yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum, hukum berada di atas segala-galanya.

Hakim dan siapapun semua tunduk dan patuh di bawah supremasi hukum. Hakim dilarang menjatuhkan suatu hukuman yang bertentangan dengan hukum dan juga pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta suatu putusan yang bertentangan dengan hukum itu pula.

Dalam rumusan pasal tersebut juga dapat dipahami, bahwa asas legalitas mengandung unsur hak asasi manusia (HAM), yang berkenaan

⁴² Taufiq Hamami, *Op.cit.* Hal. 103.

dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan dan perlindungan hukum.⁴³

Asas legalitas artinya pengadilan mengadili menurut hukum, ini berarti Hakim sebagai organ pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertindak diluar hukum, dan semua tindakannya yang dilakukan di dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas peradilan mesti menurut hukum.⁴⁴

6. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Yang dimaksud dengan peradilan secara sederhana, cepat adalah pemeriksaan yang tidak berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Bahkan, kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan . akan tetapi cukup kiranya proses pemeriksaannya dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan.

Sedangkan biaya ringan maksudnya biaya yang sudah jelas dan pasti peruntukannya tanpa ada biaya tambahan , siluman atau pelicin sehingga keseluruhan biaya untuk berperkara tidak membengkak . dan akhirnya tidak akan dipikul oleh rakyat, meskipun demikian hal semacam ini tentu tidak boleh mengorbankan ketelitian unyuk mencari kebenaran dan keadilan.⁴⁵

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai

⁴³ Mardani, *Op.cit.* Hal. 43.

⁴⁴ Taufiq Hamami, *Op.cit.* Hal. 102.

⁴⁵ *Ibid.*

kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses sidang yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan.

Jadi yang dituntut dari hakim dalam mengimpementasikan asas ini ialah:

- a. Sikap moderat arinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja di lambat-lambatkan;
- b. Tidak boleh mengurangi kecepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan, kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.⁴⁶

7. Asas Equality

Asas *equality* berarti persamaan hak dan kedudukan di depan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi, yakni membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang pengadilan. Hakim tidak boleh membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, suku, agama, jenis kelamin dan budaya. Asas equality ini diatur di dalam pasal 5 ayat (1) uu no. 4 tahun 2004 dan pasal 58 ayat (1) uu no. 7 tahun 1989 yang berbunyi peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Implementasi asas *equality* dalam sidang pengadilan, yaitu sebagai berikut :

- a. *Equal before the law*, yaitu persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

⁴⁶ Mardani, *Op.cit.* Hal. 44.

- b. *Equal protection on the law*, yaitu hak dan perlindungan yang sama oleh hukum.
- c. *Equal justice under the law* yaitu mendapat hak perlakuan yang sama oleh hukum.⁴⁷

8. Asas Membantu Para Pencari Keadilan

Asas ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi: pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin jalannya persidangan dan mencari serta menentukan hukum penyelesaian suatu sengketa/perkara yang diajukan kepadanya.

Namun ia berfungsi memberikan solusi terbaik sekaligus memberikan bantuan kepada para pihak yang berprkara secara objektif dan menunjang rasa keadilan serta berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 45.

C. Tinjauan Umum Mengenai Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang pelaksanaannya berada di luar gedung pengadilan baik itu yang dilakukan secara tetap ataupun juga insidentil.⁴⁹

Sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang langsung ke kantor pengadilan karena beberapa alasan diantaranya yaitu alasan jarak yang jauh, transportasi dan biaya menuju kantor pengadilan tersebut. Pengadilan biasanya melakukan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.⁵⁰

Jadi sidang keliling atau sering disebut sidang yang pelaksanaannya berada di luar gedung Pengadilan, adalah suatu bentuk penjabaran dari *acces to justice*, yang sudah kita ketahui bersama menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini adalah suatu bentuk atau cara untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat itu sendiri. Sebagai program pengembangan dari asas *acces to justice*, sidang keliling harusnya mendapat perhatian lebih dari

⁴⁹ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama. Hal. 5.

⁵⁰ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti. 2015. *Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidan Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya*. Surabaya. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper. Vol. I. No. 2. Hal. 106.

semua kalangan yang terkait, sehingga keadilan dapat dijangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁵¹

2. Tujuan Sidang Keliling

Sidang keliling bertujuan untuk:

- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*).
- b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.⁵² Jadi, tujuan dari diadakannya sidang keliling adalah agar lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal pihak yang mengajukan perkara, masyarakat hanya mengeluarkan biaya transportasi yang lebih ringan dan dapat menghemat waktu proses penyelesaian sengketa. Akan tetapi dalam hal melaksanakan sidang keliling ini tidak semua pengadilan melaksanakannya, terutama pengadilan yang ada di ibukota propinsi, tidak melaksanakan sidang keliling ini.⁵³

3. Penyelenggaraan Sidang Keliling

- a. Persiapan Sidang Keliling

- 1) Penentuan Sidang Keliling

⁵¹ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama. Hal. 3.

⁵² *Ibid.* Hal. 5.

⁵³ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti. *Op.cit.*

a) Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap merupakan sidang keliling yang dilakukan secara teratur di suatu tempat yang telah disetujui dan diadakan secara rutin dalam setiap tahunnya.

Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- (1) Daerah terpencil, yaitu daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- (2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- (3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
- (4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- (5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah

mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul Ketua Pengadilan setempat.⁵⁴

b) Sidang Keliling Insidentil

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:

- (1) Masyarakat setempat;
- (2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
- (3) Instansi Pemerintah lainnya;
- (4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; atau
- (5) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Keputusan sidang keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap. Khusus sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI.

b. Sidang Keliling dapat dilaksanakan di:

- 1) Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan);

⁵⁴ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama. Hal. 8.

- 2) Gedung milik Pengadilan Negeri;
- 3) Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri; atau 4) Tempat / Gedung lainnya.⁵⁵

4. Pelaksanaan Sidang Keliling

Sebenarnya semua perkara bisa diajukan untuk sidang keliling, tetapi disebabkan keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, oleh karena itu perkara yang bisa diajukan untuk sidang keliling dibatasi pada perkara tertentu saja, diantaranya yaitu :

- a. Itsbat nikah, yaitu pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA;
- b. Cerai gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri;
- c. Cerai talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh suami;
- d. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian;
- e. Hak asuh anak, pengajuan gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa; dan
- f. Penetapan ahli waris, yaitu permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.⁵⁶

5. Pendaftaran Perkara

- a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara.

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 9.

⁵⁶ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti. *Op.cit.* Hal. 107.

- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
- c. Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.
- d. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara on line dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking.
- g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.

- h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
- i. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
- j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.⁵⁷

D. Tinjauan Umum Mengenai Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah”. Itsbat artinya penetapan, pengukuhan dan pengekatan.⁵⁸ Sedangkan nikah berarti kawin.⁵⁹

Di dalam bahasa Indonesia Itsbat Nikah dikenal sebutannya yaitu Isbat Nikah, maksudnya adalah pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa : Itsbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan

⁵⁷ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama. Hal. 13.

⁵⁸ A.W. Munawwir. 1984. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Progresif. Hal. 145.

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 1461.

menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Para pemohon yang mengajukan Isbath Nikah di Pengadilan Agama menggunakannya sebagai suatu alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, kemudian dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dan dengan melampirkan penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Dengan adanya Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, Itsbat Nikah ini mempunyai manfaat dan sangat penting keberadaannya seperti tujuan dari hukum itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum.⁶⁰

2. Syarat-syarat Itsbat Nikah

Adapun syarat-syarat mengajukannya Itsbat Nikah ini termaktub di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

⁶⁰ Yusna Zaidah. *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*. Banjarmasin. Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari.

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjdisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁶¹

3. Sebab-sebab diajukannya Permohonan Isbat Nikah

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

⁶¹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2007. Bandung. Penerbit Citra Umbara. Hal. 229-230.

Alasan yang melatarbelakangi diadakannya permohonan isbat nikah ini ke Pengadilan Agama adalah, dalam praktek, khususnya di Pengadilan Agama, pihak-pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah dapat ditemukan kebanyakannya, yaitu:

- a. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974, untuk hal ini biasanya dilatarbelakangi:
 - 1) Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen;
 - 2) Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
- b. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, ini biasanya dilatarbelakangi oleh karena akta nikah hilang (bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, bisa juga digunakan untuk gugat cerai, atau bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini). Untuk kasus akta nikah hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat kutipan akta nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan; tapi kadangkala ditemukan juga pihak KUA menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di KUA.⁶²

4. Pencatatan Perkawinan

Di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dinyatakan bahwasanya setiap perkawinan itu dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pasal tersebut tidak menjelaskan maksud dari diadakannya suatu pencatatan tersebut,

⁶² Sanawiyah. 2015. *Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)*. Palangkaraya. Anterior Jurnal. Vol. 15 No. 1. Fakultas Agama Islam. UMP. Hal. 101.

dalam penjelasan umumnya hanya disebutkan bahwa setiap perkawinan pada dasarnya sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, contohnya lahirnya seseorang, matinya seseorang yang dinyatakan ke dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi, dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu, dan juga menjadi alat bukti yang otentik.

Jadi pencatatan ini tidak menentukan sah nya suatu perkawinan, akan tapi menyatakan bahwasanya peristiwa perkawinan itu pernah dilaksanakan dan pernah terjadi, ini dilakukan hanya untuk administrasi saja. Sedangkan sah nya suatu perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk melaksanakan pencatatan, pasal 2 peraturan pelaksanaan menyatakan bahwa bagi yang beragama islam dilakukakan oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama

Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.⁶³

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973, dalam Negara Republik Indonesia yang terdiri atas berbagai bentuk suku dan agama yang berlaku di wilayah ini, perdebatan serupa telah sering terjadi sejak masa pemerintahan penjajah Belanda, yaitu sejak Snouck Hurgronje menyamai teori *Receptie* di Indonesia pada sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang tujuannya untuk memperkuat penjajahan Belanda di Indonesia.⁶⁴

Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yang perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariah Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang sah sesuai syariat (hukum) Islam yang belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat yang ada di tempat itu, atau dikarenakan pembiayaan pendaftaran pencatatan yang terlalu mahal bagi masyarakat itu, atau karena lokasi Kantor Urusan Agama yang

⁶³ K. Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. Hal. 17.

⁶⁴ Neng Djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicapat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 1.

jauh dari tempat tinggal orang bersangkutan, atau karena alasan lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁶⁵

5. Pencatatan Perkawinan: Akta Nikah dan Perspektif fikih

Setelah diteliti kembali, ternyata ada beberapa pendapat kenapa pencatatan perkawinan ini cenderung diabaikan oleh fikih walaupun memang ada ayat al-Qur'an yang menyuruh untuk mencatatkan semua bentuk transaksi muamalah. Yang pertama, larangan untuk menuliskan sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur menulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. Kedua, jadi mereka sangat mengandalkan hafalan mereka, dan karena pada saat itu, perkawinan tidak sulit untuk dilaksanakan.

Ketiga, adat *walimat al-'urusy* meskipun dengan seekor kambing merupakan saksi syar'i adanya perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda, dan perkawinan pada masa itu berlangsung dimana sang mempelai pria dan sang mempelai wanita berada dalam suatu wilayah yang sama, oleh karena itu selain saksi belum dibutuhkan.

Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

⁶⁵ *Ibid.* Hal. 2.

Seiring berkembangnya zaman yang selalu bertambah modern maka banyak juga perubahan-perubahan yang timbul, dari kebiasaan lisan menjadi kebiasaan tulis, oleh karena itu perlu adanya akta, sebagai bukti otentik, sebab saksi hidup tidak mampu lagi diandalkan tidak saja karena dapat hilang dengan dikarenakan kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kekhilafan. Oleh karena itu diperlukan lah sebuah bukti yang otentik yang disebut dengan akta.⁶⁶

6. Perspektif UU No. 1 Tahun 1974

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa fikih tidak membicarakan pencatatan perkawinan. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan Undang-undang perkawinan yang sebagaimana terlihat nanti, tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagaimana sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 tahun 1975.

Pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam Undang-undang Perkawinan hanya di atur dalam satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut

⁶⁶ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan . 1980. *Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KH*. Jakarta. Penerbit Prenada Media Kencana. Hal. 121.

tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.⁶⁷

7. Perspektif KHI

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagai mana yang diatur dalam uu no. 22 tahun 1946 jo. Uu no. 32 tahun 1954.

Selanjutnya dalam pasal 6 dijelaskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.* Hal. 123.

⁶⁸ *Ibid.* Hal. 124.